KLIPING PERPUSTAKAAN DPR-RI
http://kliping.dpr.go.id

Judul : Pansus Angket ingin temui Jokowi
Tanggal : Selasa, 19 September 2017
Surat Kabar : Suara Pembaruan
Halaman : 9

Suara Pembaruan | Selasa, 19 September 2017

Pansus Angket Ingin Temui Jokowi

Kejagung Kembangkan Kasus Korupsi BKKBN



ANTARA FOTO/HAFIDZ MUBARAK A

Wakil Ketua Pansus Hak Angket KPK Masinton Pasaribu (kiri) dan Teuku Taufiqulhadi (kanan) memberikan keterangan pers jelang 60 hari kerja Pansus Hak Angket KPK di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (18/9).

[JAKARTA] Panitia Khusus (Pansus) Hak Angket Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menemukan sejumlah pelanggaran yang dilakukan KPK. Temuan sebanyak lima koper tersebut akan dilaporkan kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Wakil Ketua Pansus Hak Angket KPK Masinton Pasaribu menjelaskan, Pansus akan menemui Presiden Jokowi sebelum rapat paripurna 28 September 2017. Jadwal itu merupakan akhir masa kerja pansus selama 60 hari.

Pansus angket, kata Masinton, sudah melakukan rapat-rapat baik dalam rapat dengar pendapat di gedung DPR maupun kunjungan ke lapangan. Pansus juga menggelar rapat di luar gedung DPR seperti BPK, Kepolisian, Kejaksaan, dan Dirjen Pemasyarakatan Kemkumham.

"Panitia angket temukan beberapa hal, temuan signifikan berkaitan dengan empat hal seperti kelembagaan KPK, anggaran KPK, tata kelola sumberdaya manusia dan perihal penegakan hukum.

"Hasil temuan akan terlebih dulu sampaikan kepada presiden sebagai Kepala Negara dan Kepala Pemerintahan. Setelah itu baru dibawa ke paripurna," ujar Masinton, di kompleks parlemen, Senayan Jakarta, Senin (18/9).

Laporan kepada Presiden, kata Masinton, sangat penting. Tujuannya agar pemerintah mengkaji penyimpangan kinerja KPK.

Dia berharap, ke depan pemberantasan korupsi di Indonesia berhasil membangun sistem yang baik tanpa penyimpangan. Menurutnya, negara harus mampu membangun sistem antikorupsi.

Sebelum tugas mereka berakhir pada 28 September mendatang, Panitia Khusus (Pansus) Hak Angket KPK di DPR akan mengundang para komisioner KPK untuk melakukan konfirmasi atas temuan-temuan yang ada. Para komisioner KPK diharap hadir. Kalau tak bersedia hadir, Pansus KPK tak peduli dan akan lanjut dengan kesimpulan dan rekomendasi.

Masinton mengatakan, pihaknya juga menyediakan waktu dan tempat bagi KPK mengklarifikasi segala temuan mereka di Pansus. Pihaknya berharap KPK hadir sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada rakyat, dalam hal ini DPR. Karena UU 32/2002 tentang KPK menyaratkan pertanggungjawaban KPK adalah kepada presiden, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), dan DPR.

"Tentu dalam hal ini, agar semuanya jelas dan terang benderang, dan tidak sepihak, maka kehadiran KPK menjadi penting untuk memberikan konfirmasi dan klarifikasi terhadap temuan-temuan di hadapan Pansus Angket DPR," katanya.

Dalami

Kejaksaan Agung (Kejagung) mengaku masih mendalami kemungkinan adanya keterlibatan pihak lain dalam dugaan korupsi pengadaan alat KB tahun 2014-2015 di Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN).

Dalam kasus tersebut, penyidik kejaksaan sendiri telah menetapkan Kepala BKKBN Surya Candra Surapaty sebagai tersangka. Surya merupakan tersangka keempat setelah sebelumnya kejaksaan menetapkan status tersangka kepada Kepala Seksi Penyediaan Sarana Program yang juga mantan Kasi Sarana Biro Keuangan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Karnasih Tjiptaningrum, Dirut PT Triyasa Nagamas Farma Yenni Wiriawaty dan Direktur PT Djaja Bima Agung, Luana Wiriawaty.

"Tentunya kami masih akan dalami terus. Kalau masih ada yang lain, kami akan kembangkan. BKKBN itu lembaga yang harus mengamankan populasi di negara," kata Jaksa Agung M Prasetyo, Senin (18/9) di Jakarta.

Dijelaskan Prasetyo, dalam pengadaan alat KB 2015 disediakan pagu anggaran sekitar Rp 191 miliar dari APBN. Sebagai pimpinan lembaga pengguna anggaran, Kepala BKKBN diduga sudah menimbulkan kerugian negara sekitar Rp 27 miliar.

Meskipun ditetapkan sebagai tersangka, Kejagung sendiri hingga kini belum melakukan penahanan terhadap Surya. Untuk pemeriksaan tersangka, dijadwalkan akan dilakukan pada pekan depan. [MJS/H-14/Y-7]